

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Rizanda (2012), melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011, dengan menggunakan alat Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Hasil analisis dapat diketahui bahwa Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, sedangkan Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Arbi (2013), melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012 yaitu dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi se Indonesia dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap BM, tetapi secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dina, Wayan Cipta dan Suwendra (2014), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun Ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. (2) Ada pengaruh positif dan signifikan

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. (3) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. (4) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. (5) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). dan (6) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, dengan menggunakan alat Regresi sederhana dan Regresi Berganda. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Hasil penelitian ini membuktikan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Otonomi Daerah

#### a. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi wewenang mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam upaya memberdayakan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan daerah dan anggaran daerah adalah:

- 1) Pengelolaan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda, dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS-daerah, baik risiko maupun dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
- 7) Prinsip pengelolaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntansi public dalam pengawasan, pemberian opini, dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada public.,
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan. Peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat para pengembangan profesionalisme aparat pemerintahan daerah.
- 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

b. Kewenangan daerah Otonom

Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup (Ulum, 2005:47).

- 1) Kewengan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewengan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kahutanan, dan perkebunan.
- 2) Kewengan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/parawisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang propinsi.
- 3) Kewengan kelautan yang meliputi eksplorasi, konversi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.
- 4) Kewengan yang tidak atau belum dapat di tangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kaqbupaten atau kota tersebut.

c. Desentralisasi dan Kemandirian

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi FI=iskal adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah (Adi, 2006) dalam Riris, 2008:14.

Secara teoritis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertaama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2004:6)

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan kemajuan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah.

## **2. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**

### **a. Desentralisasi Fiskal**

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenagn oleh

pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *Pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam membangun, serta mendorong hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi.

Dari kebijakan desentralisasi fiskal tersebut mampu memberikan perubahan yang lebih baik dan menghasilkan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, yaitu: *pertama*, diharapkan mampu menyelesaikan masalah disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumberdaya manusia. *Kedua*, merupakan strategi bangsa Indonesia untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang berorientasi publik.

b. Dana Perimbangan

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah sendiri.

Menurut Halim (2002:65) dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis yaitu: bagi Hasil Pajak, Bagi hasil buka Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Darurat.

### **3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No.33 tahun 2004).

APBD terdiri dari:

a. *Anggaran Pendapatan*, terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

b. *Anggaran Belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.

c. *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Halim (2006:16) menyebutkan bahwa suatu Anggaran daerah yang termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



- 1) Rencana kegiatan daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis dan kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1(satu) tahun.

Proses penyusunan Anggaran memiliki empat tujuan (Ulum,2005:119) yaitu:

- 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasian antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public melalui proses pemrioritas.
- 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat fertikal.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Halim (2002:64) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana tau pengadaan barang dana tau jasa oleh daerah.

#### **5. Pengertian Transfer dan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi

kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk, menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim,2003) dalam Kamilawati (2010:20). Sedangkan menurut analisis Zou(1994) dalam Ulum (2004) berhasil mengidentifikassi beberapa knsekuensi dari perubahan Grant yaitu:

- a. Kenaikan permanen dalam *matching grant* akan mempercepat invstasi public, memperbesar capital jangka panjang dan memperbesar Belanja Rutin jangka panjang.
- b. Kenaikan permanen dalam *matching grant* untuk investasi dan belanja rutin mungkin mempercepat atau memperlambat investasi.
- c. Kenaikan temporer atas *grant* sekarang (apapun bentuk *grant*) akan mendorong investasi public.
- d. Kenaikan Temporer *non-matching grant* pada masa yang akan datang akan mengurangi investasi sekarang dan meningkatkan belanja rutin sekarang.
- e. Kenaikan temporer *matching grant* pada masa yang akan datang untuk belanja rutin akan mengurangi investasi public sekarang dan memperbesar belanja rutin sekarang.
- f. Kenaikan sementara dalam *matching grant* pada masa yang akan datang untuk investasi mempunyai dampak ambigu terhadap investasi publik (Karmilawati, 2010: 20).

Terhadap empat unsur dalam dana perimbangan, salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang

berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh pemerintah daerah.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal merupakan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, index kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Index Pemabangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

Proporsi DAU antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah propinsi dihitung dengan rumus:

$$\text{DAU Propinsi} = \frac{\text{Bobot Daerah Propinsi yang Bersangkutan}}{\text{seluruh provinsi di Indonesia} \times \text{Jumlah DAU seluruh Propinsi}}$$

*Sumber: PP No. 53 Tahun 2009*

**Tabel 2.1**

**Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU Provinsi**

Berdasarkan Tabel 2.1 bahwa Bobot Daerah Propinsi yang dimaksud disini adalah perbandingan antara celah fiskal daerahpropinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi.

DAU atas celah fiskal untuksuatu daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus:

$$\text{DAU Kab/Kota} = \frac{\text{Bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh kabupaten/kota di provinsi}} \times \text{DAU seluruh Daerah Kab/Kota}$$

*Sumber: PP No.53Tahun 2009*

**Tabel 2.2**

**Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU Kabupaten/Kota**

*Sumber: PP No.53Tahun 2009*

Berdasarkan pada tabel 2.2 yaitu Bobot Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud diatas merupakan perbandingan celah fiskal seluruh Kabupaten.Kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh Kabupaten/Kota.

Henley at al (1992) dalam Mardiasmo (2002:157) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
- b. Untuk meningkatkan akutanbilitas (*promote accountability*)

- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah, Pemerintah Pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

## 6. Belanja Modal

Belanja modal adalah penggunaan anggaran untuk perolehan investasi permanen, asset tetap, dan asset lainnya yang berwujud digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintah pusat atau daerah dan melayani masyarakat. Sedangkan menurut Halim (2002) dalam Karmala (2010: 23) Belanja modal merupakan penguasaan pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparat pemerintah. Contoh belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi masa, dan pembelian mobil ambulan.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparat pemerintah. Contoh: pembelian kendaraan dinas pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah.

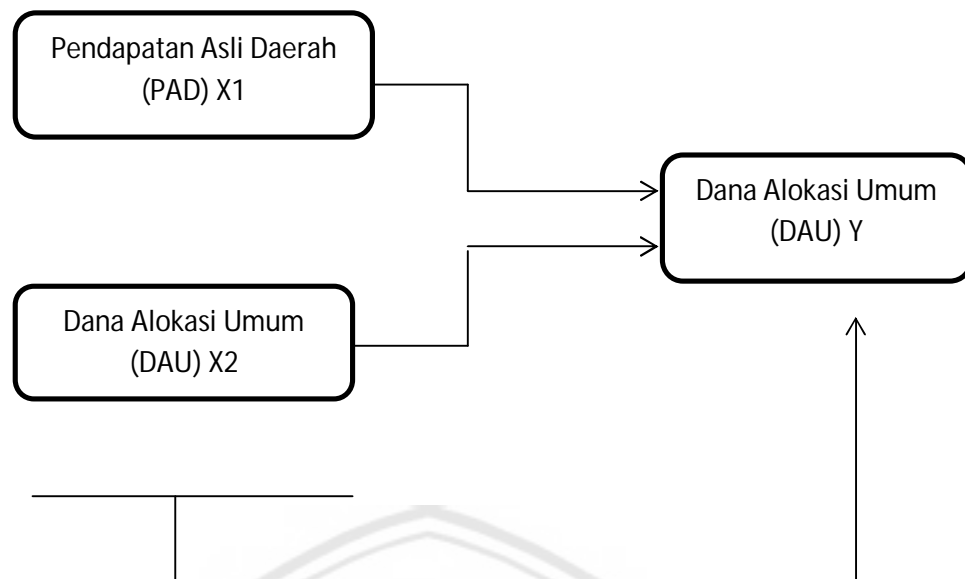
## **7. Hubungan PAD, DAU, Dan Belanja Modal**

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan komitmen dari Pemda untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki daerahnya untuk membentuk suatu kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud apabila Pemda dalam mengalokasikan belanja daerah lebih memperhatikan belanja modal.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, diharapkan pemda mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengendalikan transfer dari pusat. Prakoso (dalam Harianto dan Adi, 2007:18) memperoleh temuan empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari Pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) dalam Karamala (2010:25) mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketrgantungan Pemda terhadap transfer Pemerintah Pusat semakin tinggi.

## **8. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel-variabel yang juga telah dijelaskan sebelumnya.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Model Penelitian**

Sumber: kerangka pikir

## 9. Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Diduga Variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Maluku”. Adapun hipotesis dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.



Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2012), Randi (2008), Nuarisa (2007) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal. Peningkatan investasi modal atau belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (mardiasmo, 2002). Maka berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat diformulasi hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : PAD pengaruh positif terhadap belanja modal

## 2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2007), Yovia (2008), Akbar (2012), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. DAU berpengaruh terhadap Anggaran belanja Modal, hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal (Putro, 2011). Namun Moisio (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dan membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri disbanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti grant atau

transfer). Maka berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat diformulasi hipotesis sebagai berikut:

$H_2$  : DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

